



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKRAM**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **719025**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.774.250.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/159 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 455 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
3. Tanah Seluas 1555 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 544.250.000
4. Tanah Seluas 4100 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.025.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 265.000.000**

1. MOBIL, ZUZUKI ERTIGA GL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO 125 SE88/SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G/T/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 112.700.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 2.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 3.153.950.000****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.153.950.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.